

Pengaruh Rasio Kemandirian dan Rasio Utang Pada Pendapatan Terhadap Keberlanjutan Keuangan Pada Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera

Silvia Agustina¹, Yevi Dwitayanti², Maulidia Berlianti³

¹Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya, silviaagustina122003@gmail.com

²Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya, yevi_dwitayanti@polsri.ac.id

³Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya, maulidia.berlianti@polsri.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi pengaruh Rasio Kemandirian dan Rasio Utang terhadap Pendapatan terhadap Keberlanjutan Keuangan Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari 10 provinsi di Pulau Sumatera selama periode 2019–2023. Total sampel yang dianalisis sebanyak 50 data observasi. Metode analisis yang digunakan meliputi analisis regresi data panel dengan pengujian yang dilakukan menggunakan perangkat lunak *Econometric Views (EViews)* versi 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan keuangan, sementara Rasio Utang terhadap Pendapatan memiliki pengaruh negatif dan signifikan secara parsial. Secara simultan, kedua variabel tersebut terbukti berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Rasio Kemandirian, Rasio Utang Pada Pendapatan, Keberlanjutan Keuangan.

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of identifying the influence of Independence Ratio and Debt to Revenue Ratio on the Financial Sustainability of Local Government on Sumatra Island. The population in this study is the Regional Government Financial Report (LKPD) from 10 provinces in Sumatra Island during the 2019–2023 period. The total sample analyzed was 50 observation data. The analysis methods used include panel data regression analysis with tests carried out using Econometric Views (EViews) software version 12. The research results show that the Independence Ratio has a partial positive and significant effect on financial sustainability, while the Debt to Revenue Ratio has a partially negative and significant effect. Simultaneously, the two variables are proven to have a significant effect on the financial sustainability of the local government.

Keywords : Independence Ratio, Debt To Revenue Ratio, Financial Sustainability.

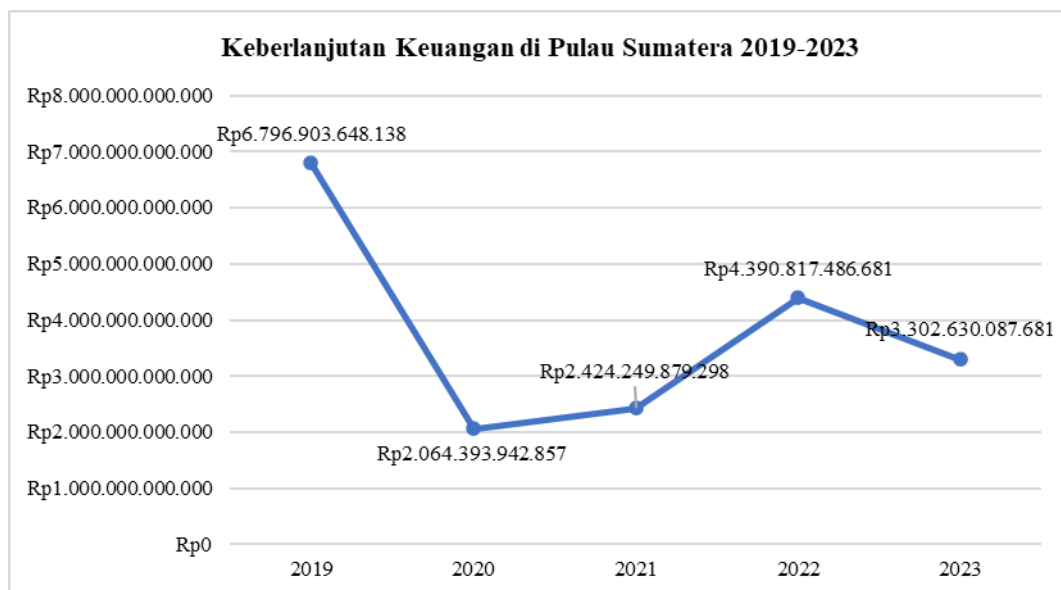
A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kompleksitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, mengingat luasnya wilayah dan keberagaman karakteristik sosial-budaya. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan desentralisasi melalui Otonomi Daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan tujuan pemerintah daerah dapat mengelola kepentingan sendiri secara mandiri, termasuk dalam hal keuangan. Harapannya, daerah mampu memperkuat kemandirian fiskal dan tidak terus bergantung pada pemerintah pusat. Namun, kenyataannya masih banyak daerah yang sangat tergantung pada dana transfer dari pusat, sehingga mengindikasikan belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah.

Keberlanjutan keuangan muncul sebagai indikator penting dalam menilai sejauh mana suatu daerah dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka panjang tanpa

ketergantungan yang tinggi terhadap dana eksternal. Keberlanjutan keuangan (*financial sustainability*) menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan untuk operasional dan pembangunan tanpa bergantung pada sumber pendanaan eksternal (Lhutfi & Sugiharti, 2022). Pengukuran ini tidak hanya menggambarkan stabilitas fiskal, tetapi juga mencerminkan kualitas pelayanan publik yang bisa dijaga atau ditingkatkan oleh pemerintah daerah.

Pulau Sumatera sebagai salah satu wilayah strategis di Indonesia terdiri dari berbagai provinsi dengan karakteristik ekonomi, sosial, dan fiskal yang berbeda. Keberagaman ini menjadikan kajian terhadap faktor-faktor yang memengaruhi *financial sustainability* di provinsi-provinsi di Sumatera menjadi penting. Berikut ini adalah data keberlanjutan keuangan (*financial sustainability*) pada pemerintah provinsi di Pulau Sumatera dalam periode anggaran 2019-2023.



Gambar Keberlanjutan Keuangan Di Pulau Sumatera 2019-2023

Sumber : BPK RI, Data Diolah (2025)

Berdasarkan gambar diatas, keberlanjutan keuangan pemerintah provinsi di Pulau Sumatera pada tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, nilai keberlanjutan keuangan mencapai titik tertinggi sebesar Rp6,79 triliun. Namun, terjadi penurunan drastis pada tahun 2020 menjadi Rp2,06 triliun, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Kondisi ini sempat membaik pada tahun 2021 dan meningkat signifikan pada 2022, tetapi kembali mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi Rp3,30 triliun. Fluktuasi ini menggambarkan belum stabilnya kondisi keberlanjutan keuangan (*financial sustainability*) di wilayah tersebut, yang menuntut pemahaman lebih lanjut terhadap faktor yang memengaruhinya.

Dalam studi ini indikator yang digunakan untuk menilai keberlanjutan keuangan (*financial sustainability*) antara lain rasio kemandirian dan rasio utang terhadap pendapatan, dimana masing-masing indikator mencerminkan kapasitas daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja secara berkelanjutan. Menurut Mahmudi (2019) semakin tinggi rasio kemandirian, semakin mandiri daerah tersebut dalam membiayai operasionalnya tanpa bergantung pada dana pemerintah pusat. Sedangkan menurut Al-Obaidi & Almashhadani (2023) rasio utang dapat

menunjukkan kemampuan pemerintah daerah membayar utang dengan pendapatan yang dimiliki sehingga dapat menilai kapasitas pembiayaan jangka panjang tanpa membebani generasi mendatang.

Penelitian Lhutfi & Sugiharti (2022) menyatakan kemandirian mempunyai pengaruh positif pada *financial sustainability*. Kemudian penelitian Aryasi dkk (2023) juga menyatakan bahwa kemandirian memiliki dampak positif yang signifikan, namun berbanding terbalik dengan penelitian Syahriyal dkk (2024) yang menunjukkan kemandirian tidak mempunyai pengaruh pada *financial sustainability*. Penelitian *financial sustainability* juga dilakukan oleh Wardhani & Payamta (2020) menyatakan rasio utang berpengaruh negatif terhadap *financial sustainability*. Hasil penelitian mengenai *financial sustainability* di sektor pemerintahan masih terbatas, dan kebanyakan dilakukan di Eropa, Australia, dan Amerika Serikat. Penelitian oleh Subires dkk (2019) melakukan penelitian yang berfokus pada sosial-demografi saja dan tidak berfokus pada variabel keuangan.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana rasio kemandirian serta rasio utang pada pendapatan berpengaruh terhadap keberlanjutan keuangan pemerintah provinsi di wilayah Pulau Sumatera.

B. KAJIAN TEORI

Teori Penetapan Tujuan (Goal Setting Theory)

Menurut (Locke & Latham, 2006) tujuan yang terstruktur dengan tingkat kesulitan tinggi dan menantang cenderung menghasilkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan tujuan yang terlalu umum atau tidak spesifik. Dalam konteks organisasi sektor publik, penetapan tujuan tidak hanya berorientasi pada aspek keuntungan, tetapi juga pada efektivitas pemanfaatan sumber daya secara efisien guna memperoleh performa maksimal (Aulia, 2020). Sehubungan dengan hal tersebut, hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan hasil kinerja menjadi penting dalam mendorong pencapaian tata kelola keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan teori tersebut, keberlanjutan keuangan sebagai penetapan tujuan utama pemerintah daerah menjadi relevan. Tujuan ini dapat diwujudkan melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai cerminan tingkat kemandirian fiskal, serta pengelolaan utang daerah yang bijak. Peningkatan kontribusi PAD terhadap total pendapatan untuk kemandirian suatu daerah dalam membiayai operasionalnya (Nugroho, 2017). Sementara itu, pengendalian rasio utang penting untuk menjaga ruang fiskal dan keberlanjutan keuangan jangka panjang.

Keberlanjutan Keuangan (*Financial Sustainability*)

Keberlanjutan Keuangan (*Financial Sustainability*), sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, adalah Suatu ekosistem yang belum sepenuhnya didukung oleh kebijakan, regulasi, norma, standar, serta produk, transaksi, dan layanan keuangan yang mampu menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembiayaan kegiatan berkelanjutan serta transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menurut Lhutfi & Sugiharti (2022) keberlanjutan keuangan merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan untuk operasional dan pembangunan secara mandiri tanpa bergantung pada sumber pendanaan eksternal. Tantangan utama dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam hal ini adalah pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.



Jika keadaan keuangan stabil, maka keadaan keuangan yang baik dapat bertahan lama dan tidak menambah beban kepada masyarakat (Wardhani & Payamta, 2020).

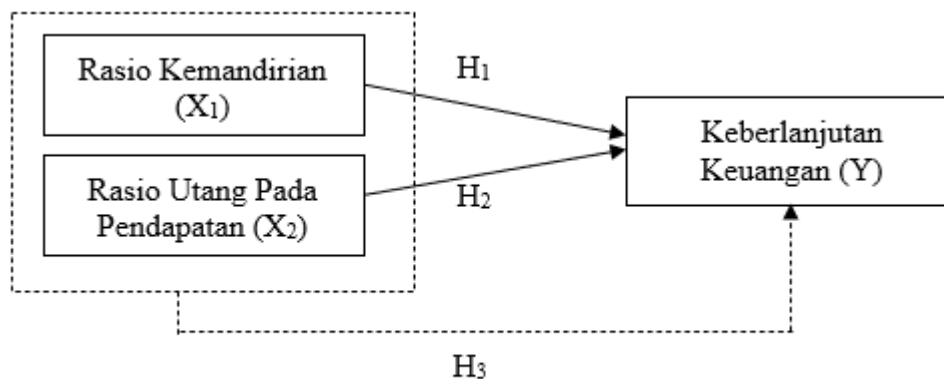
Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan merupakan perbandingan total PAD dengan total pendapatan transfer pusat dan provinsi dan pinjaman daerah (Mahmudi, 2019). Jumlah yang lebih tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki tingkat kemandirian keuangan yang lebih baik. Kemampuan suatu daerah untuk berdiri sendiri untuk menjalankan otonomi dan kemandiriannya pada pemerintah dipimpin oleh kemandirian keuangan.

Rasio Utang Pada Pendapatan

Didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, utang daerah diartikan sebagai sejumlah kewajiban finansial yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah, baik secara langsung maupun melalui tanggung jawab hukum, yang timbul dari ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian resmi, maupun dasar hukum lainnya yang sah. Rasio ini merepresentasikan proporsi pendapatan provinsi yang dialokasikan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang (Wardhani & Payamta, 2020).

Kerangka Pemikiran



Gambar Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran diatas, keberlanjutan keuangan (Y), yang merupakan variabel terikat, dipengaruhi baik sebagian maupun bersama-sama oleh rasio kemandirian (X1) dan Rasio Utang Pada Pendapatan (X2) variabel bebas. Berikut hipotesis penelitiannya:

- H₁ : Rasio Kemandirian memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan keuangan pada pemerintah provinsi di Pulau Sumatera.
- H₂ : Rasio Utang Pada Pendapatan memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan keuangan pada pemerintah provinsi di Pulau Sumatera.
- H₃ : Rasio Kemandirian memiliki dan Rasio Utang Pada Pendapatan secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan keuangan pada pemerintah provinsi di Pulau Sumatera.

C. METODE PENELITIAN

Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini guna mempelajari populasi atau sampel tertentu. Laporan keuangan pemerintah yang diperoleh dari website BPK RI merupakan data sekunder untuk penelitian ini. Penelitian ini mencakup

seluruh pemerintah provinsi Pulau Sumatera, dengan sampel yang digunakan dari 10 provinsi selama periode 2019–2023, menghasilkan total 50 pengamatan. Metode sampel non-probabilitas dengan sampel jenuh digunakan untuk mengumpulkan data sampel.

Variabel terikat berupa keuangan keberlanjutan (*financial sustainability*) yang dinilai dengan melihat surplus/defisit dalam laporan operasional. Sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini yaitu rasio kemandirian yang mana diukur melalui nilai PAD dibagi total pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Selanjutnya variabel rasio utang pada pendapatan yang mana dalam penelitian ini melakukan pengukuran dengan total utang dibagi jumlah pendapatan.

Kajian ini memakai teknik analisis data berupa analisis regresi data panel yang diolah menggunakan bantuan EViews versi 12, yang terdiri dari analisis statistik deskriptif, pemilihan model regresi data panel, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Metode statistik deskriptif dimanfaatkan dalam menguraikan nilai rerata (*mean*), terendah, tertinggi dan standar deviasi atas data variabel independen maupun variabel dependen.

Hasil Uji Statistik Deskriptif

	X1	X2	Y
Mean	0.747504	0.102182	26.80363
Median	0.633545	0.104450	26.68688
Maximum	1.760690	0.220970	32.28889
Minimum	0.206820	0.004260	21.21125
Std. Dev.	0.347149	0.056945	1.375571
Skewness	0.803578	0.250151	-0.050747
Kurtosis	3.240191	2.228506	11.41575
Jarque-Bera Probability	5.501335 0.063885	1.761469 0.414478	147.5732 0.000000
Sum	37.37522	5.109080	1340.181
Sum Sq. Dev.	5.905099	0.158892	92.71759
Observations	50	50	50

Sumber : Output EViews 12, Data Diolah (2025)

Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang ditunjukkan diatas, diketahui bahwa variabel independen rasio kemandirian (X1), dengan nilai terendah adalah 0,206820, sedangkan nilai tertinggi mencapai 1,760690, serta rerata (*mean*) 0,747504 disertai standar deviasi 0,347149. Lalu variabel rasio utang pada pendapatan (X2) memperoleh nilai terendah 0,004260 dan tertinggi 0,220970, dengan rerata (*mean*) 0,102182 serta standar deviasi 0,056945.

Analisis Pemilihan Model Data Panel

Pemilihan model data panel diterapkan melalui tiga pendekatan yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Untuk menginterpretasikan hasil analisisnya, ketiga model harus dipilih salah satu yang paling tepat. Pemilihan ini meliputi uji *chow*, *hausman* dan *langrange multiplier*.



Uji Chow

Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.792008	2	0.0082

Sumber : Output EViews 12, Data Diolah (2025)

Hasil *output* uji Hausman, diketahui bahwa nilai *probabilitas* 0,0082 juga lebih kecil dari 0,05, sehingga H_0 kembali ditolak. Ditarik kesimpulan bahwa *Fixed Effect Model* lebih sesuai dibanding dengan *Random Effect Model*.

Berdasarkan kedua pengujian (uji *Chow* dan *Hausman*), model *Fixed Effect* secara konsisten terpilih sebagai model yang paling tepat. Oleh karena itu, dari ketiga model yang dibandingkan (*Common*, *Fixed*, dan *Random*), dapat dibuat kesimpulan bahwa *Fixed Effect Model* merupakan model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini untuk menginterpretasikan hubungan antar variabel.

Uji Asumsi Klasik

Pada hasil pemilihan model regresi sebelumnya, diperoleh model yang paling sesuai adalah *Fixed Effect Model*, Oleh karena itu, jenis uji asumsi klasik yang paling relevan untuk penelitian ini adalah uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas (Basuki & Prawoto, 2022).

Uji Multikolinearitas

Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.227309	7.558582	NA
X1	0.268632	6.046212	1.054966
X2	9.983482	4.521147	1.054966

Sumber : Output EViews 12, Data Diolah (2025)

Hasil *output* uji multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai VIF < 10. Oleh karena itu, disimpulkan data tidak memiliki masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.182348	Prob. F(2,47)	0.8339
Obs*R-squared	0.384986	Prob. Chi-Square(2)	0.8249
Scaled explained SS	0.530707	Prob. Chi-Square(2)	0.7669

Sumber : Output EViews 12, Data Diolah (2025)

Hasil *output* uji heteroskedastisitas, diketahui nilai *Prob. Chi-Square* sebesar 0,8249 lebih besar dari signifikansi 0,05. Maka dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi permasalahan heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Data Panel

Pemilihan model regresi dilakukan melalui serangkaian pengujian, yaitu uji *Chow*, *Hausman*, dan *Lagrange Multiplier*. Dari hasil uji tersebut, model yang sesuai untuk digunakan yaitu *Fixed Effect Model* (FEM).

Hasil Analisis Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	25.97679	0.576774	45.03807	0.0000
X1	2.409353	0.728828	3.305793	0.0021
X2	-9.533595	3.880382	-2.456870	0.0187

Sumber : Output EViews 12, Data Diolah (2025)

Hasil *output* uregresi data panel diatas dapat juga berbentuk persamaan regresi yang dihasilkan melalui *output software EViews 12* adalah sebagai berikut :

$$Y = 25.97679 + 2.409353 \cdot X1 - 9.533595 \cdot X2 + \varepsilon$$

Berdasarkan model regresi diketahui konstanta bernilai 25,97679 yang mengindikasikan apabila variabel independen memiliki nilai 0, maka besarnya nilai keberlanjutan keuangan sebesar 25,97679. Koefisien variabel X1 sebesar 2,409353, hal ini berarti setiap peningkatan 1 satuan dari X1 menaikkan Y sebesar 2,409353. Sedangkan koefisien variabel X2 sebesar -9,533595 yang menggambarkan tiap penurunan 1 satuan dari X2 mengurangi Y senilai 9,533595, dengan mengasumsikan bahwa variabel bebas lainnya memiliki nilai tetap.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

R-squared	0.472751
Adjusted R-squared	0.320127
S.E. of regression	1.134219
Sum squared resid	48.88523
Log likelihood	-70.38324
F-statistic	3.097476
Prob(F-statistic)	0.004632

Sumber : Output EViews 12, Data Diolah (2025)

Hasil *output* uji koefisien determinasi (R²) diperoleh diperoleh nilai R-Squared senilai 0,472751 atau sekitar 47,27%. Artinya, rasio kemandirian dan rasio utang terhadap pendapatan secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi *financial sustainability* sebesar 47,27%. Sisanya, yaitu 52,73% yang diakibatkan oleh faktor lain yang berada diluar struktur model yang digunakan. Menurut (Ghozali, 2018) meskipun nilai R-Squared di bawah 50%, hal ini masih dapat diterima dalam penelitian sosial ekonomi karena dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal.



Uji Parsial (Uji t)

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	25.97679	0.576774	45.03807	0.0000
X1	2.409353	0.728828	3.305793	0.0021
X2	-9.533595	3.880382	-2.456870	0.0187

Sumber : Output EViews 12, Data Diolah (2025)

Hasil *output* uji signifikansi parsial (uji t), diperoleh nilai t-hitung dan t-tabel untuk variabel rasio kemandirian sebesar $3.305793 > 2,01174$ dan signifikasinya $0,0021 < 0,05$ maka H_1 diterima. Variabel rasio kemandirian (X1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan keuangan. Nilai t-hitung dan t-tabel untuk variabel rasio utang pada pendapatan sebesar $-2.456870 > 2,01174$ dan signifikasinya $0,0187 < 0,05$ maka H_2 diterima. Artinya variabel rasio utang pada pendapatan (X2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keberlanjutan keuangan.

Uji Simultan (Uji F)

Hasil Uji Simultan(Uji F)

R-squared	0.472751
Adjusted R-squared	0.320127
S.E. of regression	1.134219
Sum squared resid	48.88523
Log likelihood	-70.38324
F-statistic	3.097476
Prob(F-statistic)	0.004632

Sumber : Output EViews 12, Data Diolah (2025)

Hasil *output* uji simultan (uji F), nilai F-hitung yang dihasilkan senilai 3,097476, tingkat signifikansi sebesar 0,004632. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 mengarah pada penolakan H_0 dan penerimaan H_1 , yang berarti bahwa rasio kemandirian serta rasio utang terhadap pendapatan secara bersama-sama memiliki dampak signifikan terhadap keuangan keberlanjutan (*financial sustainability*).

Pembahasan

Pengaruh Rasio Kemandirian terhadap Keberlanjutan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian, menunjukkan rasio kemandirian memiliki tingkat signifikansi senilai 0,0021 yang berada di bawah ambang 0,05 ($0,0021 < 0,05$), serta t-hitung senilai 3,305793 yang lebih besar dari t-tabel 2,01174. Dari temuan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa rasio kemandirian berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan keuangan pemerintah provinsi di wilayah Sumatera. Hasil ini sejalan dengan temuan dari penelitian sebelumnya Lhutfi & Sugiharti (2022), Aryasi et al (2023), Khairunisa et al (2024), Trisna et al (2023) dan Ernawati (2024) yang menyimpulkan bahwa rasio kemandirian berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan keuangan. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan Syahriyal et al (2024) menyimpulkan bahwa rasio kemandirian tidak memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan keuangan.

Mahmudi (2019) menjelaskan bahwa semakin tinggi rasio kemandirian maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah secara otonom. Kondisi ini dapat mencerminkan kemandirian fiskal yang kuat, yang akan mendukung tercapainya keberlanjutan keuangan. Selaras dengan konsep teori penetapan tujuan (*goal setting theory*), jika pemerintah daerah mampu mengelola dan mengoptimalkan potensi lokalnya secara efektif dan efisien akan lebih stabil dalam pelayanan dan pembiayaan publik secara berkelanjutan, sehingga dapat mendukung tercapainya keberlanjutan finansial.

Pengaruh Rasio Utang Pada Pendapatan terhadap Keberlanjutan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian, variabel rasio utang terhadap pendapatan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,0187, yang lebih kecil dari batas signifikansi 0,05 ($0,0187 < 0,05$). Selain itu, nilai t-hitung sebesar -2,456870 secara absolut lebih besar dari t-tabel 2,01174 ($|-2,456870| > 2,01174$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa rasio utang terhadap pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keberlanjutan keuangan pada pemerintah provinsi di Pulau Sumatera. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Wardhani & Payamta (2020), Gleißner et al (2022) dan Al-Obaidi & Almashhadani (2023) yang menyimpulkan rasio utang pada pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keberlanjutan keuangan. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan Santis (2020) dan Trisna et al (2023) mengemukakan rasio utang pada pendapatan berdampak positif dan signifikan terhadap *financial sustainability*.

Ketika otoritas lokal memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang rendah, maka daerah tersebut cenderung memiliki potensi untuk melakukan pinjaman. Rasio utang terhadap pendapatan dapat dianggap sebagai indikator risiko terhadap keberlanjutan keuangan, yang berarti semakin besar rasio tersebut, semakin rendah tingkat keberlanjutan keuangan yang dimiliki oleh daerah tersebut (Frintrup & Hilgers, 2023). Rasio utang yang tinggi akan berdampak negatif terhadap keberlanjutan keuangan, karena meningkatkan beban pembayaran bunga dan pokok utang. Berdasarkan teori penetapan tujuan (*goal setting theory*), dengan adanya pengendalian utang, pemerintah daerah dapat menjaga kestabilan keuangannya agar tidak membahayakan keberlanjutan fiskal sehingga dapat mencapai tujuan keberlanjutan keuangan.

Pengaruh Rasio Kemandirian dan Rasio Utang Pada Pendapatan terhadap Keberlanjutan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian pada uji statistik f menunjukkan nilai 3,097476, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,004632. Dalam hal ini dilihat bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa rasio kemandirian serta rasio utang terhadap pendapatan secara bersama-sama memiliki dampak signifikan terhadap keuangan keberlanjutan (*financial sustainability*). Dalam hal ini, jika pemerintah daerah secara kolektif mampu meningkatkan tingkat kemandirian fiskal serta menekan pertumbuhan utang daerah, maka hal tersebut dapat mendukung tercapainya keberlanjutan keuangan (*financial sustainability*).

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Merujuk pada hasil pembahasan dan analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirangkum beberapa point kesimpulan berikut ini:



1. Secara parsial, rasio kemandirian terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *financial sustainability* pada pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera. Artinya, semakin tinggi kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya secara mandiri, maka semakin besar pula potensi tercapainya keberlanjutan keuangan fiskal yang baik.
2. Secara parsial, Rasio utang pada pendapatan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial sustainability* pada pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera. Hal ini mengindikasikan bahwa tingginya rasio utang dapat membawa dampak negatif terhadap keberlanjutan fiskal di masa mendatang, serta menambah beban keuangan bagi generasi selanjutnya.
3. Secara simultan, rasio kemandirian dan rasio utang pada pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial sustainability* pada pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera.

Saran

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian pembahasan dan kesimpulan sebelumnya, terdapat beberapa saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah provinsi di Pulau Sumatera untuk dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menekankan jumlah utang agar tidak membebani keuangan di masa depan, dengan memberikan pelayanan publik yang berkelanjutan tanpa bergantung pada dana/bantuan pemerintah pusat maupun pinjaman daerah.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menambahkan variabel independen selain yang digunakan dalam penelitian ini seperti jumlah penduduk serta memperluas objek penelitian menjadi lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Obaidi, M. B. M., & Almashhadani, A. N. (2023). Financial Sustainability Assessment in Iraq for The Period 2015-2021. *Resmilitaris*, 13(1), 758–767.
- Aryasi, P. P., Periansya, P., & Dwitayanti, Y. (2023). Pengaruh Kemandirian, Efisiensi dan Kinerja Keuangan Terhadap Financial Sustainability Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Bagian Selatan. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2), 544–555.
- Aulia. (2020). Goal Setting Theory Vs Reinforcement Theory: In RUH Perspective Theory. *Seminar Nasional Magister Psikologi Universitas Ahmad Dahlan, 2012*, 62–75.
- Basuki & Prawoto. (2022). *Analisis Regresi pada kajian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS dan Eviews* (Monalisa (ed.); Edisi 2). Rajawali Pers.
- Ernawati, B. P. P. (2024). *Pengaruh IPM dan Kemandirian Keuangan Terhadap Financial Sustainability Pemerintah Kota Yogyakarta*. 7, 76–81. <https://doi.org/10.36815/prive.v7i1.3305>

- Frintrup, M., & Hilgers, D. (2023). Drivers and risk factors of German local financial sustainability focusing on adjusted income. *International Review of Administrative Sciences*, 90(1), 29–47. <https://doi.org/10.1177/00208523221143289>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gleißner, W., Günther, T., & Walkshäusl, C. (2022). Financial sustainability: measurement and empirical evidence. In *Journal of Business Economics* (Vol. 92, Issue 3). Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/s11573-022-01081-0>
- Khairunisa, D. R., Saftiana, Y., & Sari, R. (2024). Pengaruh Kemandirian Dan Efisiensi Keuangan Daerah Terhadap Keberlanjutan Keuangan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(4), 9152–9158. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.10488>
- Lhutfi & Sugiharti. (2022). Financial Sustainability of Local Governments in Indonesia. *JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET)*, 14(1), 159–170. <https://doi.org/10.4324/9781003498230>
- Locke & Latham. (2006). New Directions In Goal-Setting Theory. *CURRENT DIRECTIONS IN PSYCHOLOGICAL SCIENCE*, 6(15–5), 265–268.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (4th ed.). UPP; STIM YKPN.
- Nugroho, P. (2017). Analisis Atas Kemandirian Pemda Dalam Mengelola Keuangannya. *Info Artha*, 5, 93–106. <https://doi.org/10.31092/jia.v5i1.64>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Santis, S. (2020). The demographic and economic determinants of financial sustainability: An analysis of Italian local governments. *Sustainability (Switzerland)*, 12(18). <https://doi.org/10.3390/su12187599>
- Syahriyal, S., Abdullah, S., & Meutia, R. (2024). What Determines Financial Sustainability in Local Government? Evidence from Aceh Province, Indonesia. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 8(3), 261–274. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v8i3.3106>
- Trisna, T. B., Diswandi, & Nugraha, A. P. I. N. (2023). Determinants of Budget Transparency Toward Financial Sustainability. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 139(7), 98–113. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2023-07.11>
- Wardhani, D. T., & Payamta, P. (2020). Menguji Faktor Determinan Financial Sustainability pada Sektor Pemerintah. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(1), 13. <https://doi.org/10.33603/jka.v4i1.3305>

